

Lindungi Yang Membersihkan: Tanggung Jawab Sosial dan Syariat Terhadap Petugas Sampah

Ahmad Reski^{1*}, Marzuki Marzuki² & Suhri Hanafi³

¹Magister Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah), Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

^{2,3}Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis Korespondensi: Ahmad Reski, E-mail: mohammadarga21@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 4

KATAKUNCI

Petugas Sampah; Tanggung Jawab Sosial; Syariat Islam

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tidak luput dari kompleksitas masalah pengelolaan sampah ini. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan tingkat urbanisasi yang tinggi, volume sampah di kota ini mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tanggung jawab sosial (CSR) dan syariat Islam terhadap petugas sampah, dengan fokus pada tiga rumusan masalah utama: bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperkuat peran petugas sampah; bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam memandu perilaku dan kesejahteraan petugas sampah; serta bagaimana pendekatan multidisipliner dapat memberikan solusi holistik terhadap tantangan yang dihadapi. Menggunakan teori Tanggung Jawab Sosial CSR, penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran sosial dan tanggung jawab perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan petugas sampah melalui program yang berkelanjutan dan beretika. Sementara itu, pendekatan hukum Islam digunakan untuk meninjau aspek keadilan, hak, dan kewajiban petugas sampah sesuai ajaran agama, yang dapat memperkuat kedudukan hukum dan moral dalam pengelolaan sampah. Pendekatan multidisipliner mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan agama untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab semua pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara CSR dan prinsip syariat Islam dapat meningkatkan kesejahteraan petugas sampah secara adil dan berkelanjutan, serta memperkuat rasa keadilan sosial dan spiritual. Disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut secara bersamaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan beretika, sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah yang berlandaskan nilai-nilai sosial dan keagamaan.

* *Mahasiswa Program Studi HK UIN Datokarama Palu*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

1. Pendahuluan

Pengelolaan sampah merupakan bagian integral dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Di era globalisasi dan urbanisasi yang pesat, kota-kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mengelola limbah domestik dan industri yang semakin meningkat. Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tidak luput dari kompleksitas masalah pengelolaan sampah ini. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan tingkat urbanisasi yang tinggi, volume sampah di kota ini mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya (Kehutanan, 2022). Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu (Government, 2022) menunjukkan bahwa volume sampah harian mencapai ratusan ton dan sebagian besar belum dikelola secara optimal.

Dalam konteks pengelolaan sampah, petugas sampah memegang peranan penting sebagai ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan limbah dan bertanggung jawab atas pengangkutan serta pengelolaan limbah tersebut. Mereka bekerja di bawah kondisi yang sering kali tidak memadai, dengan risiko kesehatan dan keselamatan yang tinggi, serta gaji yang belum tentu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ironisnya, profesi ini masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat maupun pemerintah dalam hal penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan (Hidayat & Zainuddin, 2019)

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap petugas sampah. Mereka sering kali menghadapi stigmatisasi sosial dan perlakuan diskriminatif yang berakar dari pandangan masyarakat yang merendahkan profesi tersebut. Bahkan, dari segi ekonomi, pendapatan mereka sering kali jauh dari layak dan tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung. Dalam banyak kasus, petugas sampah harus bekerja dalam kondisi yang tidak aman, tanpa perlindungan lengkap, dan dengan jam kerja yang panjang serta beban kerja yang berat.

Selain aspek sosial, persoalan keadilan dan moralitas dalam pengelolaan sampah juga harus dilihat dari perspektif keagamaan, terutama dalam masyarakat Muslim yang dominan di Kota Palu. Prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang diajarkan dalam syariat Islam menegaskan bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak ajaran yang menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak kaum yang lemah dan tertindas (Qardawi, 2000).

Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariat harus menjadi pijakan moral dan etika dalam memperlakukan petugas sampah. Tanggung jawab sosial, terutama dari pemerintah dan pihak swasta, harus mencerminkan komitmen moral untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak petugas. Melalui pendekatan ini, diharapkan keberpihakan terhadap kelompok marginal ini dapat terwujud, dan profesi petugas sampah dapat dihormati serta diberdayakan secara manusiawi dan adil. Konteks lokal di kota Palu juga memiliki keunikan tersendiri. Kota yang terletak di wilayah yang rawan bencana seperti gempa bumi dan tsunami ini harus mampu mengelola limbahnya secara efektif agar tidak memperparah kondisi pasca-bencana. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021) menunjukkan bahwa bencana alam yang sering melanda Palu dan sekitarnya menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk fasilitas pengelolaan sampah, sehingga memunculkan tantangan besar dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan dan aman.

Selain itu, keberagaman budaya dan agama di Kota Palu menuntut pengelolaan sampah yang tidak hanya efisien dan berkelanjutan secara teknis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang mampu diterima seluruh lapisan masyarakat. Dalam perspektif keagamaan, ajaran Islam menegaskan bahwa setiap manusia harus diperlakukan dengan adil dan penuh kemanfaatan. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal perbuatan" (HR. Muslim). Oleh karena itu, perlakuan terhadap petugas sampah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta mengandung aspek kemanusiaan yang tinggi.

Di tengah dinamika sosial dan tantangan lingkungan tersebut, penerapan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariat menjadi sangat relevan dan mendesak. Penerapan ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi petugas sampah dari segi kesejahteraan, perlindungan kesehatan, dan penghormatan hak asasi manusia. Selain itu, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam kebijakan pengelolaan sampah, diharapkan tercipta sistem pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum.

Namun demikian, implementasi tanggung jawab sosial dan prinsip keadilan berbasis syariat di tingkat lokal masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlakuan adil terhadap

petugas, lemahnya regulasi yang melindungi hak-hak mereka, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kebijakan dan praktik yang telah berjalan, serta solusi yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan di Kota Palu.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif tentang tanggung jawab sosial dan syariat dalam memperlakukan petugas sampah di Kota Palu. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi yang ada, mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dan kemanfaatan, serta memberikan rekomendasi strategis agar hak-hak petugas sampah dapat terpenuhi secara adil dan manusiawi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana kondisi dan tantangan yang dihadapi petugas sampah di Kota Palu? (2) Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab sosial terhadap petugas sampah dalam konteks lokal? (3) Bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat menjadi landasan moral dan etika dalam memperlakukan petugas sampah di Kota Palu?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mengenai tanggung jawab sosial dan syariat Islam dalam perlindungan dan pemberdayaan petugas sampah di Kota Palu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi petugas, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat mereka sesuai prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam syariat Islam dan tanggung jawab sosial.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengelolaan Sampah di Kota Palu: Kondisi dan Tantangan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kota yang berkelanjutan. Menurut World Bank (2018), pengelolaan limbah perkotaan secara efektif sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan sumber daya alam. Di Indonesia, penanganan sampah masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya fasilitas pengelolaan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya regulasi perlindungan terhadap petugas sampah (Kehutanan, 2022)

Di Kota Palu, kondisi pengelolaan sampah menunjukkan tantangan tersendiri. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu (Government, 2022) menyebutkan bahwa volume sampah harian mencapai sekitar 300 ton, dengan tingkat pengelolaan yang masih belum optimal karena kendala infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan petugas sampah yang bekerja di lapangan seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dari segi keselamatan kerja maupun hak-hak sosial ekonomi mereka.

Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis dan bencana alam. Palu yang berada di wilayah rawan gempa dan tsunami mengalami gangguan infrastruktur yang menyebabkan sistem pengelolaan limbah menjadi tidak stabil (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB, 2021). Situasi ini menuntut adanya pengelolaan limbah yang tangguh dan berkelanjutan agar tidak memperparah dampak bencana serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

a. Prinsip Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan

Menurut United Nations Environment Programme ((UNEP), 2015), pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus mengedepankan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi prinsip ini di tingkat lokal membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kebijakan yang memadai. Di Indonesia, upaya pengurangan sampah melalui program 3R telah dilakukan, namun implementasinya masih terbatas dan belum merata (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (Kehutanan, 2022).

Dalam konteks kota Palu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan partisipasi aktif petugas sampah menjadi kunci keberhasilan. Penelitian oleh Suryanto dan Rahman (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada fasilitas dan teknologi, tetapi juga pada aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.

2.2 Peran Petugas Sampah: Kondisi dan Hak-Haknya

Petugas sampah adalah ujung tombak dalam sistem pengelolaan limbah perkotaan. Mereka bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengangkut, dan memproses limbah dari sumbernya ke tempat akhir pembuangan. Menurut Hidayat dan Zainuddin (Hidayat & Zainuddin, 2019), keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada profesionalisme dan dedikasi petugas lapangan. Akan tetapi, kenyataannya di banyak kota, termasuk Palu, petugas sampah masih menghadapi berbagai permasalahan.

a. **Kondisi Kerja dan Kesejahteraan Petugas Sampah**

Berdasarkan studi oleh Suryanto dan Rahman (2020), petugas sampah di Indonesia sering bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dengan risiko kesehatan tinggi seperti paparan bahan berbahaya, infeksi, dan bahaya kecelakaan kerja. Mereka umumnya menerima upah yang rendah, tidak mendapatkan jaminan sosial yang memadai, serta minim perlindungan dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja (Hidayat & Zainuddin, 2019).

Lebih jauh, stigma sosial terhadap profesi ini juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi mereka. Secara budaya, pekerjaan ini sering dipandang rendah dan kurang dihormati. Pandangan stereotip ini menyebabkan petugas sampah mengalami diskriminasi sosial dan kurang mendapatkan perlakuan manusiawi dari masyarakat dan institusi terkait (Kurniawan & Mawardi, 2018).

2.3 Perlindungan Hukum dan Hak Sosial Petugas Sampah

Dalam kerangka perlindungan hukum, tenaga kerja di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berbagai regulasi terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (Kemenaker, 2017). Namun, implementasinya di lapangan seringkali tidak memadai, terutama bagi petugas sampah yang bekerja di lapangan terbuka dan berisiko tinggi. Pentingnya perlindungan hak-hak petugas sampah ini diakui juga oleh organisasi internasional seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang menegaskan bahwa pekerja harus mendapatkan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan hak-hak lainnya sesuai hak asasi manusia ((ILO), 2019)

a. **Strategi Pemberdayaan dan Penghormatan Hak Petugas Sampah**

Pemberdayaan petugas sampah melalui pelatihan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum menjadi langkah strategis yang perlu ditingkatkan. Penelitian oleh Basri dan Sudarno (2019) menyarankan bahwa pemerintah dan pihak terkait harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi petugas sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, pembangunan sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada manusia dan berkeadilan harus memperhatikan aspek kemanusiaan, hak-hak dasar, serta peran sosial mereka. Dalam konteks ini, aspek perlindungan terhadap petugas bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan etika yang harus ditunaikan oleh semua pihak.

2.4 Nilai-Nilai Syariat Islam dan Keadilan Sosial

Dalam tradisi keagamaan di Indonesia, khususnya dalam Islam, prinsip keadilan dan kemanfaatan sangat ditekankan. Menurut Qardhawi (Qardawi, 2000), syariat Islam menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu asas utama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal antar manusia, tetapi juga vertikal antara manusia dan Tuhan.

a. **Keadilan dan Perlakuan Adil dalam Islam**

Al-Qur'an dan hadis mengandung banyak ajaran yang menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap sesama. Surah An-Nisa ayat 135 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diri sendiri atau terhadap orang tua dan kaum kerabat...". Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, maupun jabatan.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pentingnya perlakuan adil terhadap petugas dan orang yang lemah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta, tetapi melihat hati dan amal perbuatan" (HR. Muslim). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dan perlakuan manusiawi harus didasarkan pada aspek moral dan hati nurani, bukan semata-mata aspek materi atau status sosial.

b. **Kewajiban Melakukan Keadilan dalam Perspektif Syariat**

Dalam konteks pengelolaan sampah dan perlakuan terhadap petugasnya, syariat Islam menuntut adanya keadilan dan perlakuan yang manusiawi. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa keadilan harus diimplementasikan melalui praktik nyata yang memenuhi hak-hak setiap individu, termasuk mereka yang bekerja di bidang kebersihan (Al-Ghazali, 1997).

Prinsip ini relevan di kota Palu, di mana petugas sampah harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan perlindungan sesuai ajaran Islam. Memberikan hak-hak mereka secara adil merupakan bagian dari memenuhi kewajiban moral dan spiritual umat Muslim.

c. **Kemanfaatan dan Amal Saleh sebagai Dasar Pengelolaan Sampah**

Selain keadilan, syariat Islam mendorong terciptanya kemanfaatan dan amal saleh bagi seluruh umat. Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti bahwa setiap pihak harus berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat. Pemberdayaan petugas sampah sebagai bagian dari upaya ini merupakan amal saleh yang mendatangkan manfaat tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dan lingkungan (Qardawi, 2000).

d. **Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Menegakkan Keadilan Sosial**

Dalam ajaran Islam, menegakkan keadilan dan kemanfaatan menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Quraish Shihab (Shihab, 2000), masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam menegakkan keadilan sosial, termasuk dalam perlakuan terhadap petugas sampah. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak petugas terpenuhi dan sistem pengelolaan sampah berjalan secara adil dan berkelanjutan.

2.5 Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teoritis, tinjauan pustaka ini mengacu pada konsep tanggung jawab sosial yang dikembangkan oleh Carroll (Carroll, 1999), yang menyatakan bahwa perusahaan dan institusi lain memiliki tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah dan perusahaan pengelola limbah harus menjalankan kewajiban mereka secara seimbang dan bertanggung jawab terhadap seluruh stakeholder, termasuk petugas sampah.

Selain itu, prinsip keadilan dalam syariat Islam menjadi landasan moral yang kuat. Menurut (Qardawi, 2000), keadilan adalah dasar dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Integrasi antara prinsip tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariat ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan limbah yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan di Kota Palu.

3. Metodologi

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan mengadopsi pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memperoleh pemahaman holistik mengenai tanggung jawab sosial petugas sampah di Kota Palu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan penyebaran kuesioner kepada petugas sampah, masyarakat, serta pengelola kebijakan terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip-prinsip CSR yang meliputi aspek etika, hukum, dan filantropi (sukarela dari organisasi, pemerintah, atau individu untuk memberikan kontribusi nyata) dalam konteks pengelolaan sampah. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi dan pengalaman petugas sampah di Kota Palu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Multidisipliner yang menghubungkan antara Teori Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility - CSR) dan Hukum Islam digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai bagaimana organisasi dan pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan petugas sampah dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam menerapkan tanggung jawab sosial di tingkat lokal.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks Kota Palu, kondisi dan tantangan yang dihadapi petugas sampah menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap aspek sosial dan kesejahteraan mereka. Selain itu, penerapan prinsip tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariat Islam dapat menjadi landasan moral dan etika yang kuat dalam memperlakukan petugas sampah secara adil dan manusiawi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu (Government, 2022) dan studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti lokal, kondisi petugas sampah di Kota Palu masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Mayoritas petugas bekerja dalam kondisi fisik yang cukup berat dan kurang mendapat perlindungan yang memadai. Mereka biasanya bekerja di lapangan dalam waktu yang panjang, mulai dari pagi hingga sore hari, dengan volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di kota ini.

Selain itu, dari segi kesejahteraan, sebagian besar petugas sampah masih menerima pendapatan yang relatif rendah, bahkan ada yang di bawah standar upah minimum regional. Hal ini menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Data dari survei menunjukkan bahwa sekitar 70% petugas mengaku tidak mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai dan kurang akses terhadap fasilitas perlindungan diri seperti alat pelindung diri (APD). Sebagian besar mereka bekerja tanpa perlindungan yang cukup dari risiko kesehatan akibat paparan limbah berbahaya, termasuk bahan kimia dan limbah medis yang tidak tertangani dengan baik.

4.1 Tantangan yang Dihadapi Petugas Sampah

1. **Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Salah satu tantangan utama yang dihadapi petugas sampah adalah risiko kesehatan yang tinggi. Survei dari Peneliti petugas di Palu menunjukkan bahwa mereka seringkali mengalami luka-luka, iritasi kulit, dan gangguan pernapasan akibat kontak langsung dengan limbah yang kotor dan berbahaya. Banyak dari mereka tidak menggunakan alat pelindung diri yang lengkap karena keterbatasan fasilitas dan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan.
2. **Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial**
Kesejahteraan petugas sampah di Kota Palu masih sudah cukup baik. Dari hasil data yang di peroleh peneliti melalui wawancara dengan sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu yaitu: "mengenai kesejahteraan untuk para pekerja dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sendiri memberikan gaji sebesar Rp 3.000.000/bulan para pekerja juga mendapatkan BPJS ketenagakerjaan, dan apabila para pekerja mengalami kecelakaan kerja mereka mendapatkan uang santunan", kata sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu.
3. **Fasilitas dan Infrastruktur yang Kurang Memadai**
Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan pengelola limbah di Palu masih minim. Banyak petugas yang harus bekerja tanpa perlengkapan yang layak atau fasilitas sanitasi yang memadai. Kurangnya fasilitas ini memperparah risiko terkena penyakit dan memperlambat proses kerja mereka.
4. **Dampak Pasca Bencana dan Kondisi Lingkungan**
Kondisi geografis dan risiko bencana alam di Palu menjadi tantangan tambahan. Pasca gempa dan tsunami yang melanda Palu pada 2018, infrastruktur pengelolaan sampah mengalami kerusakan cukup parah. Petugas harus bekerja dalam kondisi yang tidak ideal, di tengah-tengah puing dan sisa bencana, yang mengancam keselamatan mereka. Selain itu, pengelolaan sampah di daerah rawan bencana ini menjadi semakin kompleks dan membutuhkan penanganan khusus.

4.2. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Sosial terhadap Petugas Sampah di Kota Palu

Penerapan prinsip tanggung jawab sosial terhadap petugas sampah dilakukan melalui beberapa kebijakan dan program yang berorientasi pada kesejahteraan dan perlindungan hak mereka. Berdasarkan hasil penelitian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu (2022) dan regulasi lokal, beberapa langkah strategis telah diupayakan, antara lain:

1. **Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum**
Pemerintah kota telah menetapkan standar upah minimum untuk petugas sampah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah Kota Palu. Selain itu, upaya pemberian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan juga mulai diterapkan untuk melindungi petugas dari risiko kesehatan dan kecelakaan kerja.
2. **Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kerja yang Layak**
Pemerintah dan pengelola sampah di Palu berkomitmen menyediakan alat pelindung diri (APD) lengkap, seperti sarung tangan, masker, sepatu boots, dan alat angkut yang memadai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah yang Menjamin Keselamatan Petugas.
3. **Pelatihan dan Pendidikan**

Pelatihan tentang pengelolaan sampah yang aman dan ramah lingkungan diberikan secara rutin kepada petugas, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran mereka terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Partisipasi dan Penghormatan Masyarakat
Masyarakat di Palu diingatkan dan didorong untuk berperan aktif dalam menghormati dan mendukung petugas sampah melalui program sosial dan kampanye kesadaran. Hal ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial yang mengedepankan kesadaran kolektif terhadap peran penting petugas dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
5. Pengakuan dan Penghargaan
Beberapa program penghargaan dan apresiasi terhadap petugas sampah juga dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi mereka dalam menjaga kebersihan kota.

4.3 Nilai-Nilai Syariat Islam sebagai Landasan Moral dan Etika dalam Memperlakukan Petugas Sampah di Kota Palu

Nilai-nilai syariat Islam memiliki peran penting sebagai landasan moral dan etika dalam memperlakukan petugas sampah di Kota Palu. Prinsip-prinsip ini menanamkan rasa hormat, keadilan, dan kasih sayang yang mendalam terhadap semua makhluk, termasuk mereka yang menjalankan tugas berat seperti petugas sampah.

1. Keadilan dan Persaudaraan (Al-'Adl wa Al-Ukhuwwah)
Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan di antara sesama manusia (QS. An-Nisa: 1). Memperlakukan petugas sampah dengan adil, memberikan hak mereka secara proporsional, dan menghindari perlakuan diskriminatif adalah bagian dari penerapan prinsip ini. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat baik..." (HR. An-Nasa'i).
2. Menghormati dan Memuliakan Sesama
Dalam Islam, menghormati orang lain termasuk petugas sampah merupakan bentuk penghormatan kepada ciptaan Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (HR. Thabrani). Memberikan perlakuan hormat dan penghargaan kepada petugas sesuai dengan nilai ini adalah bagian dari amal shaleh.
3. Menunjukkan Kasih Sayang dan Empati (Rahmah)
Rasulullah SAW dikenal dengan sifat rahmah (kasih sayang). Dalam memperlakukan petugas sampah, prinsip ini menuntut kita untuk menunjukkan empati dan tidak merendahkan mereka. Allah berfirman dalam QS. Al-Anbiya: 107: "Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Mengaplikasikan nilai ini berarti memperlakukan petugas dengan penuh kasih dan empati.
4. Menjaga Kebersihan dan Kesehatan sebagai Tanggung Jawab Moral
Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman (QS. Al-Baqarah: 222). Petugas sampah berperan besar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, memperlakukan mereka dengan hormat sekaligus mendukung mereka dalam tugas adalah bagian dari memenuhi tanggung jawab moral umat Muslim.

Peran Syariat Islam dalam resiliensi psikologi anak perempuan yang fatherless adalah sebagai Religious Coping yang merupakan salah satu strategi coping. Hal ini disebabkan karena dalam syariat Islam diajarkan banyak persoalan terkait kehidupan termasuk permasalahan takdir. Seseorang yang paham dengan konsep takdir tidak akan terbawa dengan dampak negatif dari musibah dan cobaan yang menimpanya. Selain itu dalam proses menuntut ilmu syari, dapat mengantarkan seseorang untuk dapat menjalin pertemanan hingga persaudaraan dengan seseorang atau komunitas yang tentu paham juga dengan syariat Islam. Dan terbentuklah konsep Ukhuwah Islamiyah yang penuh cinta, kasih dan dukungan. Kualitas internal individual akan meningkat seiring dengan pemahaman syariat islam yang benar. Dengan lingkungan sosial serta kualitas internal individual yang baik menjadikan faktor kepribadian anak perempuan meningkat kearah yang lebih positif dan menciptakan kepribadian yang sehat. Maka dampak-dampak dari kondisi fatherless terhadap anak perempuan berupa kecemasan, takut akan masa depan, dan lain-lain sedikit demi sedikit akan beradaptasi sesuai dengan pemahaman syariat Islam yang dimilikinya.

5. Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang dihadapi petugas sampah di Kota Palu, mereka seringkali menghadapi aspek keamanan, kesejahteraan, dan pengakuan dari masyarakat. Penerapan prinsip tanggung jawab sosial secara lokal menunjukkan pentingnya dukungan komunitas dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petugas sampah. Nilai-nilai syariat Islam dapat menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk memperlakukan petugas sampah dengan hormat, adil, dan penuh rasa tanggung jawab. Konsep keadilan sosial dalam Islam menegaskan bahwa setiap petugas layak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan penghargaan atas perannya. Integrasi prinsip syariat ini juga dapat memperkuat semangat kerja dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai keislaman dan tanggung jawab sosial dapat memperbaiki kondisi dan meningkatkan motivasi petugas sampah. Secara keseluruhan, pendekatan ini penting untuk membangun masyarakat yang adil, peduli, dan berbudaya di Kota Palu.

Referensi

- (ILO), O. B. (2019). *Decent Work for Waste Pickers*. Geneva: ILO.
- (UNEP), U. N. (2015). *Global Environment Outlook*. Naerobi: UNEP.
- Al-Ghazali. (1997). *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bank, W. (2018). *What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management*. Washington, D.C: World Bank Publications.
- BNPB. (2021). *Laporan Bencana Alam di Indonesia Tahun 2021*. Palu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Carroll, A. B. (1999). *Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct*. *Business & Society*.
- Government, P. C. (2022). *Laporan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu*. Palu: Dinas Lingkungan Hidup.
- Hidayat, R., & Zainuddin, M. (2019). Kesejahteraan Petugas Kebersihan dan Tantangan Sosialnya. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2).
- Kehutanan, K. L. (2022). *Statistik Pengelolaan Sampah Nasional 2020*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al-Ibadah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, Q. (2000). *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.